

**PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MAKUNJUNG
KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA
KABUPATEN MURUNG RAYA
KALIMANTAN TENGAH**

Cris Aditya Pratama, Ferry Setiawan

Abstrak

Penelitian ini mengangkat tentang Bagaimana Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (jalan) di Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, dan Faktor apa saja yang menjadi Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Bintoro Tjokroamidjojo (2000 :42) tentang bagaimana peran dari Pemerintahan Desa dengan indikator teori perannya sebagai Motivator, Fasilitator dan Mobilisator dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Peran Pemerintahan Desa untuk pemberian motivasi Pemerintahan Desa sebenarnya sudah memberikan motivasi dalam bentuk arahan, namun sepertinya tidak menyeluruh diterima masyarakat. hal ini ditandai dengan adanya pendapat kontra yang mengatakan bahwa kurang bahkan tidak adanya pemberian motivasi ini yang dilakukan oleh pemerintahan desa (2) Peran pemerintahan desa disini sebagai seorang fasilitator ada memberikan bantuan ataupun fasilitas baik berupa alat kerja, dana, serta upaya dengan pengadaan proposal dan kerjasama dengan pihak swasta/perusahaan untuk pembangunan jalan desa. Namun sepertinya fasilitas yang diberikan tidak menyeluruh dirasakan oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya pendapat yang kontra atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena dirasa tidak adanya pemberian fasilitas yang dilakukan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat. (3) Peran pemerintahan desa Makunjung disini sebagai mobilisator ataupun penggerak masyarakat untuk turut ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan seperti gotong royong jalan desa itu ada dilakukan namun sepertinya tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat dan dinilai kurang bahkan tidak ada oleh masyarakat (4) Rancangan atau rekomendasi yang diajukan pada musrembang sulit untuk diperjuangkan pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Kendala yang dihadapi lebih kepada pembagian dana yang ada dengan prioritas pembangunan, letak pembangunan yang tidak memungkinkan, dan kerjasama antara pemerintahan desa dengan masyarakat atau sebaliknya kurang begitu baik.

Kata Kunci : Peran, Pemerintahan Desa, Pembangunan, Infrastruktur Jalan, Desa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari berbagai daerah dan kawasan. Sebagian besar daerah di Indonesia terbagi dari banyaknya kawasan perdesaan dan perkotaan dimana berdasarkan data populasi tahun 2010 yang ditulis dalam BPS (2013 : 36) menunjukkan bahwa 49,8% penduduk tinggal pada kawasan

perkotaan. Hal ini berarti kurang lebih 50,2% bagian lainnya tinggal pada daerah atau kawasan perdesaan.

Dengan adanya semangat pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada pada wilayah Indonesia dituntut agar mampu mempunyai daya saing kewilayahan dengan tetap mempertahankan ciri khas yang ada. Untuk Kalimantan Tengah

itu sendiri, salah satu karakteristik pembangunannya itu ditandai dengan didominasikannya oleh wilayah-wilayah atau desa yang bisa dikatakan tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah pada pulau Jawa.

Pembangunan suatu desa telah tercantum dalam RPJMN 2015-2019 (PP Nomor 2 Tahun 2015), sehingga desa yang sebagai subjek pembangunan perlu diukur perkembangannya, dengan target untuk mengurangi desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri.

Bagi mereka yang tinggal dikawasan perdesaan, pembangunan merupakan sebuah aspek penting dalam meningkatkan taraf hidup, sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Ketidakmerataan pembangunan antara di daerah perdesaan dan perkotaan mengakibatkan ketimpangan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Negara.

Pada dasarnya peran pembangunan di daerah perdesaan berguna untuk meningkatkan perekonomian dan juga kualitas hidup masyarakat desa yang mengarah kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, suatu proses pembangunan pada masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan berikut ini : pertama, peningkatan keterseidaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. Kedua, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Semua itu tidak hanya bertujuan memperbaiki kesejahteraan materil, tetapi juga

menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. Ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Todaro (2003) dalam Sukarniati (2005 : 48) Artinya usaha pembangunan harus dijalankan dengan menerapkan berbagai kebijakan, strategi, dan upaya yang sesuai dengan tujuan dan sasaran rencana pembangunan, baik itu rencana jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek.

Peran Pemerintahan desa pada suatu daerah turut memberikan kontribusi besar bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut, segala program rancangan dan anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa dalam pembangunan desa memberikan dampak baik itu dalam kehidupan sosial, ekonomi ataupun pendidikannya.

Adapun ide pokok dalam pembangunan diantaranya yaitu, Pertama bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Kedua bahwa pembangunan merupakan usaha yang sadar dilaksanakan. Ketiga bahwa pembangunan itu dilakukan secara terencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan. Keempat bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Kelima pembangunan sebagai wadah pembinaan bangsa. Siagian (2004) dalam Saebani (2016 : 20) pada buku Administrasi Pembangunan.

Desa Makunjung merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Murung Raya yang bertepatan pada Kecamatan Barito Tuhup Raya, permasalahan dari segi pembangunan pada desa ini sama halnya seperti permasalahan pembangunan desa pada umumnya yang mana bisa dikatakan

kurang begitu maksimal atau memadai, hal yang membuat penulis tertarik disini yakni Desa Makunjung ini merupakan desa pusat dari kecamatan/ibu kota kecamatan (Belum menjadi kelurahan) dengan jumlah penduduk yang tergolong cukup besar, serta letak geografis desa yang berada pada Kecamatan terujung dari Kabupaten Murung Raya yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan hasil pengamatan pertama penulis serta beberapa isu tentang kurang begitu memadainya pembangunan pada desa Makunjung, pembangunan itu meliputi seperti seperti air bersih yang belum berjalan dengan baik, jalan penghubung desa yang rusak atau tidak dapat dilalui, listrik desa yang hanya menyala 5 jam saja (5 sore - 10 malam), dan tower jaringan yang belum tersedia. Dalam bidang pendidikan berupa perpustakaan desa yang dahulunya sempat ada, sekarang masih belum tersedia lagi, kurangnya tenaga pengajar, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Dalam bidang sosial ekonomi minimnya pelatihan dan pemanfaatan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Untuk status desa sendiri, desa Makunjung masih menyandang status desa tertinggal menurut data indeks pembangunan desa.

Di sini minat penulis yang ingin ditelusuri lebih lanjut yakni mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Makunjung, serta faktor apa saja yang menjadi peran dari pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya. Pada

hal ini, infrastruktur yang dimaksud yaitu infrastruktur jalan dimana penulis merasa bahwa untuk infrastuktur jalan sendiri memiliki dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan dan kemajuan bagi suatu desa, dimana dalam bidang sosial infrastuktur jalan ini memberikan akses dan memberikan keterbukaan bagi desa. Sedangkan dalam bidang ekonomi, infrastuktur jalan ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk memperkenalkan dan membuka usaha lokal yang dimiliki, serta kemudahan bagi pedagangpedagang dari luar untuk masuk ke desa.

Penggambaran lokasi penelitian secara umum disini yaitu dimana Desa Makunjung merupakan desa yang terletak pada Kabupaten Murung Raya, yang bertepatan pada Kecamatan Barito Tuhup Raya. Untuk bisa sampai kepada desa ini, bisa ditempuh melalui jalur air menggunakan taksi air, speedboat dan sejenis lainnya, dikarenakan jalur darat yang kondisinya rusak berat, badan jalan yang banyak longsor serta jembatan penghubung yang ambruk/rusak maka jalur darat masih belum dapat digunakan. Waktu yang bisa ditempuh untuk ke Desa ini sekitar 3-4 jam dari pusat kota Kabupaten yakni Puruk Cahu.

Peran Pemerintah dalam mendorong pembangunan perdesaan dilakukan dengan menetapkan kebijakan yang tepat dan tindakan yang diwujudkan dengan program nyata pemerintah. Kebijakan dan pelaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah bermuara pada tiga aspek pembangunan perdesaan, yakni terciptanya peningkatan sumber daya manusia perdesaan, peningkatan infrastruktur dan ekonomi perdesaan. Adisasmita, dkk (2006) dalam Dwiyanto (2009 : 4)

Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dimana setiap daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Dan dipertegas oleh Taliziduhu Ndraha (1987) dalam Irkani (2012 : 6) bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka sumbangan kewajiban yang wajar antara pemerintah dengan masyarakat desa. Kewajiban itu adalah menyediakan prasarana, sarana, memberikan bimbingan dan pengawasan, sedangkan selebihnya disadarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

KAJIAN PUSTAKA

Peran Pemerintah

Definisi peran berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yakni adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peran menurut versinya Horton dan Hunt juga mengatakan bahwa merupakan perilaku yang diharapkan dari seorang yang memiliki status.

Lalu untuk Desa sendiri, Soetardjo Kartohadikoesoema dalam Nain (2019 : 16), mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri, yang mana terlihat adanya empat unsur desa yakni:

- a. Wilayah atau Daerah
- b. Penduduk
- c. Tata kehidupan
- d. Otonomi

Sebagai desa yang menjadi pusat ibukota kecamatan, Desa Makunjung memang cukup banyak mengalami kekurangan dari segi infrastruktur untuk menunjang desa sebagai ibukota kecamatan. Seperti halnya akses penghubung desa sebagai pusat kecamatan dengan desa-desa pendukung lainnya yang masih terbatas, setiap kegiatan baik pemerintahan ataupun masyarakat desa hanya bisa mengandalkan transportasi melalui jalur air. Mengingat dampak dari infrastuktur jalan bagi desa cukup besar terhadap pertumbuhan dan kemajuan bagi suatu desa, dimana dalam bidang sosial infrastuktur jalan ini memberikan akses dan memberikan keterbukaan bagi desa. Sedangkan dalam bidang ekonomi, infrastuktur jalan ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk memperkenalkan dan membuka usaha lokal yang dimiliki, serta ketermudahan bagi pedagang-pedagang dari luar untuk masuk ke desa. Adapun tujuan lainnya dari pembangunan dan peningkatan infrastuktur jalan pada desa makunjung ini sendiri yakni untuk kelancaran dan kemudahan aktivitas transportasi masyarakat setempat. Dan hal ini serupa pun dikatakan oleh Asnudin (2005 : 293) dimana infrastuktur perdesaan itu merupakan infrastuktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Menurut pendapat Sagai (2016 : 6) salah satu komponen dari

pembangunan infrastruktur yakni sarana dan prasarana perhubungan yang mana meliputi jalan, jembatan, dan penyeberangan.

Artinya dalam pembangunan pada suatu desa infrastruktur khususnya jalan, ini memberikan dampak yang cukup besar dimana ia sebagai akses yang menghubungkan kegiatan masyarakat melalui jalur darat.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sjafrizal (2012 : 35) yang mengatakan bahwa jalan itu merupakan persyarataan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung, pertumbuhan suatu daerah dengan kawasan perumahan dan pemukiman, serta daerah pingiran. infrastruktur Jalan juga bertujuan untuk menunjang sebagai pusat pertumbuhan dan pemerataan dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Data yang terkumpul di olah dan dianalisis dengan menggunakan prosedur analisis kualitatif dengan teknik analisis data model interaktif yaitu cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Makunjung

Dalam rangka menilai tingkat kemajuan atau perkembangan suatu desa, maka desa dibagi menjadi 3 (tiga)

klasifikasi Menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD) yaitu : Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Desa Mandiri adalah desa yang telah terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa yang mencakup beberapa aspek yaitu : Kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah Desa, serta kelembagaan Desa yang berkelanjutan. Desa Berkembang adalah Desa yang sudah terpenuhi SPM Desa pada semua aspek tetapi pengelolaannya belum menunjukkan keberlanjutan. Sedangkan Desa Tertinggal adalah Desa yang belum terpenuhi SPM Desa pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan.

a. Peran Pemerintahan sebagai Motivator dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Makunjung

Menurut pendapat Perikesit, dkk dalam Nyoman (2014 : 14) yang mengatakan bahwa infrastruktur jalan itu merupakan infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Artinya dengan adanya infrastruktur jalan disini akan memudahkan akses kepada masyarakat terhadap pelayanan.

Berbicara mengenai peran, merujuk kepada perilaku yang diharapkan dari seorang yang

memiliki status. Dimana perilaku yang diharapkan disini yaitu agar kiranya pembangunan infrastuktur jalan desa mengarah kearah peningkatan atau lebih baik lagi.

Peran pemerintahan desa dalam hal ini merupakan hal yang bisa memberikan stimulus ataupun dorongan kepada masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa terkhususnya jalan desa. Dalam pembangunan jalan desa Makunjung, sebagian besar jalan desa baik dalam desa terutama jalan penghubung desa, pada dasarnya sudah mengalami pembukaan badan jalan atau digarap, baik itu oleh Pemerintah Kabupaten ataupun Pemerintahan Desa sendiri dan meskipun hanya garapan tanah dan belum mengalami pengerasan. Sebagai pemerintahan yang memiliki otonominya sendiri pemerintahan desa seharusnya mampu untuk mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat turut berpartisipasi baik itu dalam membangun, menjaga dan merawat infrastuktur jalan yang ada. Hal ini diperkuat oleh Djaenuri bahwa pemerintah desa itu adalah sebuah subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Aspek pemberian motivasi ini juga sangat penting dalam suatu

pembangunan, yang mana nantinya pemerintahan desa harus dapat merangkul atau melibatkan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Dimana setiap orang atau masyarakat yang diberikan motivasi atau dorongan, ransangan, dan stimulus, nantinya akan mau melaksanakan apa yang dimotivasi dengan penuh tanggung jawab dan semangat.

b. Peran Pemerintahan sebagai Fasilitator dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur Jalan di Desa Makunjung

Mengingat begitu pentingnya pembangunan pada suatu daerah ataupun desa, peran sebagai fasilitator disini memiliki bagian yang cukup besar dalam pembangunan khususnya jalan pada desa Makunjung ini. Pembangunan disini haruslah berupa rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang mana menuju kearah modernitas, hal ini juga diperkuat oleh Taliziduhu Ndraha (1987) yang mengatakan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka sumbangan kewajiban yang wajar antara pemerintah dengan masyarakat desa. Kewajiban yang dimaksud ialah menyediakan prasarana, sarana, memberikan bimbingan dan pengawasan, sedangkan selebihnya disadarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Fasilitator disini adalah seorang yang memberikan bantuan, dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatankegiatan pembangunan.

Pembangunan yang baik yaitu pembangunan yang dampaknya merata serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Jadi Peran pemerintahan desa sebagai fasilitator disini hendaknya selain memberikan bantuan fasilitas berupa dana dan alat, pemerintahan desa bisa memberikan fasilitas berupa kebijakan dan informasi yang nantinya guna menunjang pembangunan peningkatan infrastruktur terkhususnya jalan pada Desa Makunjung baik dalam ataupun penghubung antar Desa. Dalam pemberian fasilitas inilah pemerintahan desa harus dapat mengatur atau manajemen setiap anggaran yang ada dan disesuaikan dengan program yang telah dibuat guna meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan pada Desa Makunjung.

c. Peran Pemerintahan sebagai Mobilisator dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Makunjung

Jalan merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan suatu daerah dengan kawasan perumahan dan permukiman, serta daerah pinggiran. Infrastruktur jalan juga bertujuan untuk menunjang pusat

pertumbuhan dan pemerataan dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Sjafrizal (2012 : 35).

Mobilisator ialah orang yang mengarahkan atau menggerakkan serta pengawas untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

Sebagai seorang yang memiliki kendali atas pembangunan, pemerintahan desa harus bisa merangkul dan bekerja sama serta berkolaborasi untuk menggerakkan serta mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan jalan, hal ini sebagai bentuk salah satu kerjasama atau kolaborasi Pentahelix (Pemerintahan Desa dan Masyarakat), baik untuk pemeliharaan seperti gotong royong dan perbaikan.

Peran Pemerintahan sebagai Fasilitator dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Makunjung

Berbicara mengenai faktor apa saja yang menjadi penghambat dari peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pada suatu desa dalam hal ini yaitu jalan di Desa Makunjung, tentu saja cukup memiliki beberapa kendala yang dihadapi. Sebagai salah satu desa yang terletak jauh dengan pusat kabupaten, permasalahan pembangunan terutama dalam infrastruktur jalan menjadi hal yang

paling memiliki dampak dalam peningkatan pembangunan desa.

Adapun dari beberapa data hasil wawancara diatas dapat disimpulkan beberapa kendala atau faktor yang menghambat dalam peningkatan pembangunan infrastruktur jalan pada desa Makunjung, diantaranya:

- a. Kondisi atau letak pembangunan yang tidak memungkinkan.
- b. Pembangian dana.
- c. Relasi atau kerjasama antara pemerintahan desa dan masyarakat atau sebaliknya kurang begitu baik.
- d. Usulan yang sulit diperjuangkan atau direalisasikan.

Dari rangkaian faktor penghambat diatas dapat dilihat bahwa peran pemerintahan desa disini cukup memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk memberikan dan mengupayakan kemajuan pembanguan terutama jalan pada Desa Makunjung. Mengingat begitu pentingnya serta besarnya dampak dari adanya infrastuktur jalan bagi suatu desa, dimana dapat memberikan akses keterbukaan bagi desa tersebut, agar dapat mengembangkan perekonomian, serta kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam bertransportasi melalui darat.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan infrastuktur pada Desa Makunjung untuk pemberian motivasi pemerintahan desa sebenarnya

sudah memberikan motivasi dalam bentuk arahan, namun sepertinya hal ini tidak menyeluruh diterima oleh masyarakat. hal ini ditandai dengan adanya pendapat kontra yang mengatakan bahwa kurang bahkan tidak adanya pemberian motivasi ini yang dilakukan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat.

2. Peran pemerintahan desa disini sebagai seorang fasilitator ada memberikan bantuan ataupun fasilitas baik berupa alat kerja, dana, serta upaya dengan pengadaan proposal untuk pembangunan jalan desa, namun sepertinya dalam pemberian fasilitas ini tidak menyeluruh dirasakan oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya pendapat yang kontra atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena dirasa tidak ada pemberian fasilitas yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Disamping itu, pemerintahan desa disini ada menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan/swasta untuk salah satu program pembangunan jalan.
3. Peran pemerintahan desa Makunjung disini sebagai mobilisator ataupun penggerak masyarakat untuk turut ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan seperti gotong royong jalan desa itu ada dilakukan namun sepertinya tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat dan dinilai kurang bahkan tidak ada oleh masyarakat. Namun disamping itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwasannya pemerintahan desa disini tidak ada

menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bahkan kurangnya kerjasama antara pemerintahan desa dan masyarakat atau sebaliknya.

4. Setiap program pembangunan infrastruktur jalan pada Desa Makunjung pada dasarnya dirancang atau direncanakan melalui musyawarah pada tingkat desa, namun tidak berjalan dengan seharusnya. Dimana rancangan atau rekomendasi yang diajukan sulit untuk diperjuangkan pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Kendala yang dihadapi lebih kepada pembagian dana yang ada dengan prioritas pembangunan, letak pembangunan yang tidak memungkinkan dan kerjasama antara pemerintahan desa dengan masyarakat atau sebaliknya kurang begitu baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penentuan skala prioritas pembangunan yang terstruktur agar pembagian dana yang ada tidak terpecah belah dan tujuan pembangunan menjadi tidak tercapai.
2. Pemerintahan Desa Makunjung harus mampu merangkul dan bekerja sama dengan masyarakat terutama menjalin relasi yang baik.
3. Pemerintahan desa harus bisa lebih lagi memberikan motivasi, menggerakkan atau merangsang masyarakat agar bisa berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan dengan semangat dan bertanggung

jawab dengan didukung pemberian fasilitas yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adissasmita, A. (2011). *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Barokah Hidun, dkk. (2015). *Indeks Pembangunan Desa 2014 Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa*, Jakarta : Kementrian PPN/Bappenas
- Dwi, dkk. (2018). *Indeks Pembangunan Desa 2018*, Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Gunawan, M. (2015). *Kadin Indonesia Bersatu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nyoman, I. (2014). *Pembangunan infrastruktur pedesaan Berbasis ergonomi total yang inklusif dan berkelanjutan*. Denpasar: Udayana University Press.
- Nain, U. (2019). *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Saebani, A. B. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Sarwono, S. W. (2010). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Syafiie, I. K. (2013). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Widen, Kumpiady. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya Tahun 2016*. Sidoarjo: Zifatama Publisher

Sumber Jurnal/Skripsi/Tugas Akhir

Asnudin, A. (2005). Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat. *SMARTek*, 293.

Dwiyanto, H. (2009). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pedesaan Di Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Semarang: *Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro*.

Friskila, A. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Menganyam Talikur Di Desa Talingke Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan. *Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Palangka raya*. Vol 3 No. 1.

Irkami, J. H. (2012). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Desa Tertinggal Di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2012. Pekanbaru: *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Fisip Universitas Riau Bina Widya*.

Jaya, A. P. (2019). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Desa*

Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas). Palangka Raya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya.

Sagai, F. V. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Pakure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1(7), 16.

Salty, R. E. (2017). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pemerataan Listrik Di Kecamatan Tambusai Utara Tahun 2015. *Jom FISIP* Vol 4 No. 1, 1.

Sukarniati, L. (2005). Pembangunan Dan Keterlibatan Perempuan. *Jurnal Analisis Bisnis dan Ekonomi* Vol. 3 No. 1, 48.

Syahza, A. (2012). Model Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 371.

Syafitri, I. dkk (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA*, Vol 5, No. 1, 44-54.

Udang. (2020). *Efektivitas Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya*. Palangka Raya: Jurusan Ilmu

Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Palangka Raya.

Yunas, N. S. (2019). Implementasi
Konsep Penta Helix Dalam
Pengembangan Potensi Desa
Melalui Model Lumbung
Ekonomi Desa Di Provinsi
Jawa Timur. *Matra
Pembaruan Jurnal Inovasi
Kebijakn*, Vol 37.

Sumber Lain

BPS. (2013). *Proyeksi Penduduk
Indonesia, Indonesia
Population Projection 2010-
2035*. Jakarta: Badan Pusat
Statistik.

CESS. (2019). *Naskah Akademik
Pengembangan Makunjung
Kecamatan Barito Tuhup Raya
Kabupaten Murung Raya
Provinsi Kalimantan Tengah*.
Palangka Raya: Pemerintah
Kecamatan Barito Tuhup Raya
Dan Centre Of Empowerment
And Social Studies Palangka
Raya.